

## GAMBARAN RABIES DAN UPAYA PENGENDALIAN DI KABUPATEN TTS PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

**Viktoria Angelina Bere Mau<sup>1\*</sup>, R.A Karolina Tahun<sup>2</sup>, Jennie Luisa Boboy<sup>3</sup>, Roni  
Lorensus Bahan<sup>4</sup>, Harius Silfianus Tse<sup>5</sup>, Shinta Lisa Purimahua<sup>6</sup>**

Universitas Nusa Cendana Kupang<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

*\*Corresponding Author : viktoriaangelinaberemau54@gmail.com*

### ABSTRAK

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonotik yang disebabkan oleh virus Lyssavirus, family Rhabdoviridae. Rabies masih merupakan masalah kesehatan dunia termasuk juga di Indonesia. Rabies merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius karena hampir selalu menyebabkan kematian, setelah timbul gejala klinis dengan tingkat kematian mencapai 100%. Sejak tahun 2004 hingga Desember 2009 rabies telah menyebar pada 24 propinsi. Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan adanya kasus rabies pada 6 desa di Kabupaten TTS pada pertengahan tahun 2023 dan mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2023 hingga 6,5 kali lipat, hal ini diikuti dengan anggaran dan alokasi vaksin yang belum merata ke desa-desa yang terjangkit virus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka percepatan penurunan kasus rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan lebih mendalam berdasarkan teori collaborative governance dari (Ratner, 2012) melalui teknik pengambilan data berupa wawancara langsung maupun daring, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa anjing merupakan populasi yang berisiko terkait dengan penyebaran rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Program pengendalian dan pemberantasan rabies dilaksanakan melalui vaksinasi melalui VAR, eliminasi, pemisahan hewan yang dipelihara, serta pemantauan lalu lintas laut. Target vaksinasi dan eliminasi mencakup semua hewan yang rawan terhadap rabies, terutama anjing, yang ada di daerah yang terdampak penularan. Vaksinasi dilakukan pada seluruh anjing peliharaan di wilayah yang terkena wabah, dengan jarak 10 km dari posisi awal peristiwa gigitan.

**Kata kunci** : gambaran, kasus rabies, pengendalian

### ABSTRACT

*Rabies is a zoonotic disease caused by the Lyssavirus virus, family Rhabdoviridae. Rabies is still a global health problem including in Indonesia. Rabies is a very serious public health problem because it almost always causes death, after clinical symptoms appear with a mortality rate reaching 100%. Since 2004 to December 2009 rabies has spread to 24 provinces. In East Nusa Tenggara (NTT) Province, rabies cases were found in 6 villages in TTS Regency in mid-2023 and increased by 6.5 times until the end of 2023, this was followed by an uneven budget and vaccine allocation to villages infected with this virus. This research method uses qualitative research to be able to explain the problems that occur in more depth based on the collaborative governance theory from (Ratner, 2012) through data collection techniques in the form of direct and online interviews, observation, and documentation. Based on this study, it was concluded that dogs are a population at risk related to the spread of rabies in South Central Timor Regency. The rabies control and eradication program is implemented through vaccination through VAR, elimination, separation of animals kept, and monitoring of sea traffic. The target of vaccination and elimination includes all animals susceptible to rabies, especially dogs, in areas affected by transmission. Vaccination is carried out on all pet dogs in areas affected by the outbreak, with a distance of 10 km from the initial position of the bite incident. Elimination is carried out on all stray dogs or dogs that are allowed to roam, with total elimination measures.*

**Keywords** : description, rabies cases, control

## PENDAHULUAN

Rabies merupakan penyakit zoonotik yang timbul karena virus *Rabies lyssavirus*, yang menyerbu sistem saraf utama mamalia, termasuk manusia. Penularan virus ini terjadi terutama lewat gigitan atau cakaran dari hewan yang terjangkit infeksi, yang menyebarkan air liur yang mengandung virus. Penularan melalui luka atau kontak dengan air liur dari hewan terinfeksi juga mungkin terjadi (Jackson, 2013). Gejala awal dari infeksi rabies seringkali sulit dibedakan dengan penyakit lain, tetapi bila tidak cepat mendapat penanganan, bisa berkembang ke gejala neurologis yang fatal (WHO, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fooks et al. (2017), hampir 100% kasus rabies pada manusia berakhir dengan kematian jika tidak diberikan perawatan medis tepat waktu.

Di Indonesia, rabies tetap menjadi isu kesehatan masyarakat yang signifikan, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi jika tidak ditangani dengan cepat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, di tahun 2022 tercatat adanya 104.229 kasus gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies, meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Beberapa provinsi di Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan, melaporkan angka kasus rabies yang masih tergolong tinggi, sehingga memerlukan penanganan serius baik dari pemerintah daerah maupun pusat.

Menurut penelitian oleh Rupprecht et al. (2010), rabies merupakan penyakit dengan Case Fatality Rate (CFR) mendekati 100% pada manusia jika gejala sudah muncul, menjadikan upaya pencegahan seperti vaksinasi dan pengendalian populasi hewan terinfeksi sangat penting untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit ini. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, telah berusaha untuk menanggulangi rabies melalui berbagai langkah, termasuk vaksinasi pada hewan dan pengelolaan kebijakan yang melibatkan multi-sektor. Emerson et al. (2012) dalam studi mereka mengenai kolaborasi pemerintah menyatakan bahwa pengendalian penyakit zoonosis seperti rabies memerlukan sinergi antara berbagai sektor pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama antar pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat pengendalian wabah serta memberikan solusi yang lebih holistik dalam penanggulangan rabies. Hal ini sangat relevan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, yang menerapkan langkah-langkah penanganan seperti vaksinasi massal dan pengendalian selektif kepada hewan pembawa rabies.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Davies et al. (2017), kendala utama dalam penanggulangan rabies di daerah endemis adalah keterbatasan sumber daya, seperti jumlah vaksin yang tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh populasi hewan yang berisiko. Dalam kasus Kabupaten TTS, meskipun telah disediakan 17.500 dosis vaksin, distribusinya belum mencakup seluruh wilayah yang terjangkit, sehingga menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. Sebagai solusi, mereka menyarankan penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas distribusi vaksin serta mempercepat pemberian vaksinasi kepada hewan peliharaan.

Upaya Collaborative Governance sangat penting dalam konteks ini. Menurut Emerson et al. (2012), model pemerintahan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga desa dapat mempercepat proses pengendalian wabah rabies, serta menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini terbukti relevan dengan situasi di Kabupaten TTS, di mana kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan masyarakat setempat dalam pemberian vaksinasi serta pengelolaan informasi dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan rabies.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi pemerintah sebagai pemangku kepentingan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka percepatan penurunan kasus rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT.



Gambar 1. Distribusi Kasus Dugaan Rabies Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kab. TTS Sampai dengan 31 Oktober 2024

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode survei data dasar dengan rancangan cross-sectional, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang distribusi kasus rabies pada manusia dan hewan penular rabies (HPR) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini akan dilaksanakan pada periode Juli hingga Oktober 2024, dengan fokus pada analisis data sekunder yang didapat dari dua dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan Dinas Peternakan Kabupaten TTS. Populasi pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup distribusi kasus rabies pada manusia yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, dan distribusi HPR yang terinfeksi rabies yang diperoleh dari Dinas Peternakan. Sampel dalam penelitian ini adalah data yang lengkap dan valid mengenai kasus rabies pada manusia dan HPR selama lima tahun terakhir (2019-2024).

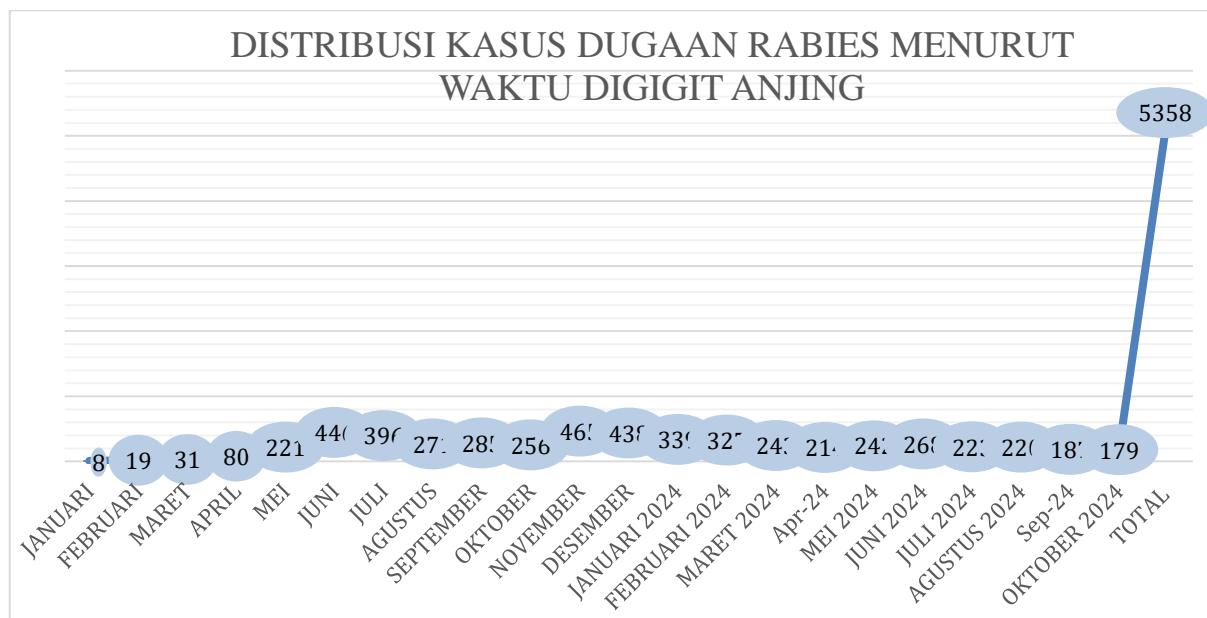
Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses data sekunder yang sudah tercatat oleh kedua dinas tersebut, yang mencakup informasi tentang jumlah kasus rabies pada manusia, jenis dan jumlah hewan yang terinfeksi rabies, serta distribusi waktu dan lokasi kejadian. Data Dinas Kesehatan akan memberikan informasi terkait kasus rabies pada manusia, sedangkan data Dinas Peternakan akan memberikan informasi mengenai populasi HPR yang terinfeksi rabies. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan metode statistik deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data mentah dari kedua dinas. Lalu data disusun dalam format tabel distribusi frekuensi agar memudahkan analisis pola dan tren penyebaran rabies baik pada manusia maupun HPR di Kabupaten TTS. Penyusunan data dalam bentuk tabel frekuensi ini akan diikuti dengan penyajian data dalam grafik untuk visualisasi yang lebih jelas, sehingga memudahkan interpretasi hasil penelitian.

Untuk menggambarkan pola distribusi kasus rabies pada manusia dan HPR, data yang telah disusun dalam tabel dan grafik akan dijelaskan lebih lanjut melalui deskripsi naratif yang mengidentifikasi tren penyebaran berdasarkan waktu dan lokasi. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran rabies, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun pengelolaan hewan penular rabies. Creswell (2014) menjelaskan bahwa desain cross-sectional sangat berguna dalam penelitian yang bertujuan menggambarkan distribusi variabel dalam populasi tertentu pada satu titik waktu, yang relevan dengan target penelitian ini untuk menganalisis data yang sudah ada. Selain itu, penggunaan data sekunder dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Bowen (2009) yang menyatakan bahwa data yang sudah tersedia dari sumber yang dapat dipercaya, seperti dinas kesehatan dan peternakan, memungkinkan pengumpulan data yang efisien dan berbasis bukti.

Dalam menganalisis data, teknik statistik deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi kasus rabies dan HPR, serta tren penyebarannya selama

lima tahun terakhir. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prevalensi dan tren wabah rabies di daerah tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Levin (2012) yang menyebutkan bahwa statistik deskriptif sangat penting dalam penelitian epidemiologi untuk menggambarkan fenomena penyakit dan mendukung kebijakan berbasis bukti. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai distribusi kejadian rabies pada manusia dan HPR di Kabupaten TTS, serta memberikan rekomendasi yang lebih strategis dalam upaya penanggulangan wabah rabies di masa depan. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman yang bermanfaat untuk pemerintah daerah dan sektor terkait dalam merumuskan kebijakan pengendalian rabies yang lebih efektif, terutama dalam konteks kerjasama antara dinas terkait dan masyarakat.

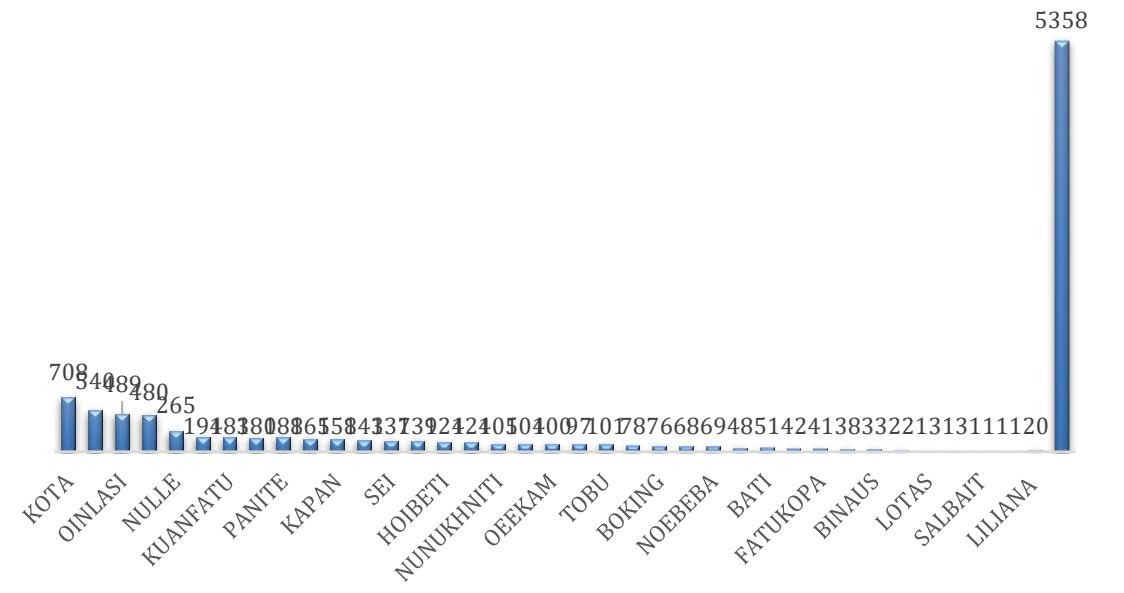
## HASIL



Gambar 2. Distribusi Kasus Dugaan Rabies Menurut Waktu Digigit Anjing

Distribusi serangan gigitan hewan penular rabies (HPR) di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara tahun 2023 hingga Oktober 2024 menunjukkan bahwa puncak kejadian kasus terjadi pada bulan yang berbeda setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 2, jumlah peristiwa gigitan anjing paling tinggi tercatat di bulan April, Juni, Juli, dan November, dengan bulan Juli menjadi bulan dengan median kasus terbanyak. Di tahun 2023, kecamatan Kota Soe tercatat sebagai lokasi dengan jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 5.508 kasus (26,95%), sementara pada tahun 2024 tercatat 5.066 kasus (24,78%). Cakupan vaksinasi pada tahun 2023 mencapai 4.873 ekor (88,47%), sementara pada tahun 2024 sekitar 1.342 ekor (26,49%). Pada tahun 2004, dilakukan eliminasi terhadap 596 ekor, namun eliminasi tidak dilaksanakan pada tahun 2007. Di Kecamatan Amanuban Timur, pada tahun 2023 tercatat 4.599 kasus (35,51%), dengan vaksinasi diadakan pada 4.550 ekor (98,93%), tetapi tidak ada eliminasi di tahun 2024.

## SEBARAN KASUS DIGIT ANJING TERDUGA RABIES MENURUT PUSKESMAS 31 OKTOBER 2024



Gambar 3. Distribusi Kasus Digigit Anjing Terduga Rabies

### PEMBAHASAN

Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus gigitan di beberapa puskesmas. Hubungan antara jumlah populasi anjing dan kasus gigitan menunjukkan bahwa semakin banyak populasi anjing, semakin tinggi pula jumlah kasus gigitan yang terjadi. Kepadatan jumlah anjing di wilayah yang endemic rabies bisa berpengaruh pada tingkat kejadian rabies di setiap peristiwa gigitan hewan penginfeksi rabies. Di Kabupaten Timor Timur Selatan, populasi yang berisiko terkena rabies ialah anjing, sehingga harus dilaksanakan upaya pembasmian pada jumlah anjing berisiko tersebut. Penjangkitan rabies di daerah perkampungan sering kali berasal dari anjing yang tidak dirawat secara efektif atau anjing jalanan, yang memiliki karakteristik umum di pedesaan. Keberadaan anjing tersebut sangat berubah-ubah dan penuh tantangan untuk dikelola, menciptakan keadaan yang mendukung bagi wilayah tersebut untuk tetap menjadi daerah endemis rabies. Upaya pemberantasan rabies dimulai setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Soe) dinyatakan sebagai wilayah yang terpapar rabies melalui surat pemberitahuan Direktur Jenderal Peternakan No. TN.506/17/B/0598 pada 8 Mei 1998. Penanganan rabies di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperintah oleh Gubernur NTT di tahun 2000, yang kemudian mengarah pada pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pengendalian hewan pembawa rabies. Di sisi lain, pada 12 Juni 1998, Gubernur NTT juga mengeluarkan keputusan untuk membentuk tim koordinasi penyelesaian rabies.

Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditetapkan sebagai wilayah terkena rabies melalui Surat Pengumuman Direktur Jenderal Peternakan No. TN.506/17/B/0598 pada 8 Mei 1998. Penanganan rabies di NTT mulai mendapat perhatian serius setelah Gubernur NTT mengeluarkan instruksi pada tahun 2000. Instruksi tersebut mendorong setiap kepala daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (PERDA) terkait pengendalian hewan terinfeksi rabies. Bukan hanya itu, menurut penetapan Gubernur NTT pada 12 Juni 1998, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Rabies (TIKOR) di tingkat provinsi, dan setiap kabupaten,

termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan, membentuk tim serupa mulai dari tingkat desa atau kelurahan dengan kepala desa atau lurah sebagai pimpinan koordinasi, dan camat sebagai pimpinan koordinasi di tingkat kecamatan.

TIKOR merumuskan strategi penanggulangan rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) kepada seluruh anjing yang dipelihara, serta sejumlah ekor dan kucing. Eliminasi sepenuhnya dilakukan terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) di daerah yang terinfeksi, dengan jarak 10 km dari lokasi kejadian positif yang sudah dikonfirmasi oleh laboratorium. Pembatasan kuantitas anjing peliharaan juga diterapkan, bersama dengan karantina dan pengawasan lalu lintas laut. Dalam pelaksanaan agenda pemberantasan rabies ini, pendekatan yang digunakan termasuk sosialisasi kepada masyarakat soal ancaman rabies, khususnya sebelum pelaksanaan vaksinasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan perantara figur masyarakat dan agama yang mengumumkan informasi tersebut selama kebaktian di gereja dan masjid. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang mendukung agar vaksinasi dan eliminasi dapat berlangsung dengan lancar tepat seperti yang direncanakan. Selain metode penyuluhan dan informasi melalui media, pendekatan lokal yang sesuai dengan kondisi setempat juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Penyuntikan VAR pada hewan bertujuan untuk memberikan perlindungan imun untuk menangkal infeksi, dengan ini hewan menjadi lebih kebal terhadap infeksi. Tetapi, pelaksanaan penyuntikan VAR di kabupaten ini belum berlangsung dengan lancar karena berbagai tantangan, seperti terbatasnya pasokan vaksin anti rabies dan tingginya biaya vaksin yang membuatnya tidak bisa dianggarkan dalam APBD kabupaten setempat. VAR hanya tersedia melalui bantuan dari pemerintah pusat, yang membatasi penggunaannya. Vaksinasi dilakukan pada seluruh anjing yang dipelihara di wilayah yang terdeteksi isu atau wabah rabies, dengan jarak 10 km dari posisi awal peristiwa gigitan. Proses vaksinasi dilaksanakan dari daerah yang terinfeksi dan diarahkan menuju titik awal kejadian, bertujuan untuk mencegah penyebaran rabies lebih lanjut. Vaksinasi idealnya dilakukan secara terpusat di lokasi yang telah ditentukan, namun bisa juga dilakukan dengan sistem rumah ke rumah, tergantung pada kondisi setempat. Karena terbatasnya stok vaksin, fokus utama vaksinasi adalah pada wilayah yang terkena isu atau wabah, serta wilayah-wilayah yang memiliki batas langsung dengan wilayah tersebut. Sementara itu, di luar wilayah tersebut, penekanan lebih diberikan pada pengawasan ketat terhadap pergerakan hewan yang rentan terhadap rabies.

Penghematan VAR bertujuan untuk mempersiapkan kemungkinan kenaikan jumlah periaswa. Terjadi lonjakan peristiwa gigitan anjing di bulan April, Juni, Juli, dan November, dengan titik tengah kejadian tertinggi terjadi pada bulan Juli. Peningkatan ini ditimbulkan oleh musim birahi anjing yang terjadi selama musim hujan. Karena musim birahi anjing berlangsung di bulan September dan November, tidak heran jika di akhir-akhir bulan, banyak anjing yang berkumpul dan dijumpai anjing betina yang bekelaran di malam hari. Meskipun belum pasti terinfeksi rabies, anjing cenderung menjadi lebih sensitif dan agresif saat musim kawin, sering kali menggigit. Penyebaran rabies lebih rentan terjadi pada musim kemarau karena saat itu anjing liar kesulitan mencari makanan, sehingga mereka turun dari hutan dan masuk ke pemukiman. Di daerah yang mengalami wabah, anjing yang menggigit dianggap berisiko terinfeksi rabies dan perlu ditangkap serta dieliminasi, terutama jika anjing tersebut merupakan anjing tanpa pemilik atau yang dilepas. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan manusia dan menutunkan angka korban. Jika anjing itu memiliki pemilik, status vaksinasi anjing perlu diperiksa. Jika anjing sudah divaksin, maka harus dilakukan observasi selama 10 hingga 14 hari. Namun, jika anjing itu belum dibaksin, sehingga wajib dieliminasi. Sesudah eliminasi, baik pada anjing yang disuntik vaksin ataupun tidak, kepala atau otaknya dikirim ke laboratorium untuk memastikan diagnosa. Upaya mengatasi rabies di wilayah yang terinfeksi dilakukan melalui cara eliminasi anjing dan kucing liar yang bekelaran di jalanan atau anjing yang tidak ada pemilik (*stray dogs and stray cats*).

Di tahun 2007, agenda eliminasi rabies yang sebelumnya bersifat total diubah menjadi eliminasi ketat, yang difokuskan pada anjing liar atau anjing yang kepemilikannya tidak jelas. Perubahan ini dilakukan sebab sebagian besar penduduk tidak setuju dengan pembunuhan anjing, mengingat nilai ekonomi anjing yang cukup tinggi, peranannya sebagai penjaga rumah dan kebun, serta fungsinya di beberapa daerah sebagai bagian dari adat, seperti untuk mas kawin atau sebagai penunjuk sumber air dan api. Berdasarkan kepercayaan masyarakat dan fakta bahwa rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan banyak disebabkan oleh masuknya anjing melalui jalur laut secara ilegal, salah satu langkah penting dalam penanggulangan rabies adalah karantina dan pemeriksaan lalu-lintas laut. Hal ini sangat relevan karena Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah daerah kepulauan. Wilayah yang rentan terhadap rabies sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya jumlah dan spesies hewan yang terinfeksi, lokasi geografis, serta lalu-lintas anjing dan hewan peliharaan lainnya, baik yang terpantau maupun tidak. Arus lalu-lintas hewan yang tidak diawasi menjadi faktor kritis dalam pencegahan rabies di wilayah tersebut.

Secara praktis, wilayah yang berbatasan dengan daerah yang terinfeksi atau wabah rabies dianggap sebagai Daerah Rawan. Hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing, harus tetap berada di dalam rumah hingga situasi darurat selesai, dan pergerakan hewan ke wilayah lain hanya dapat dilakukan dengan izin pejabat berwenang. Keadaan darurat akan tetap berlaku setidaknya selama masa inkubasi rabies (sekitar 6 bulan menurut OIE) sesudah agenda vaksinasi di daerah rawan selesai atau setelah kasus rabies terakhir teratasi. Rabies termasuk dalam penyakit kategori B menurut OIE, yang sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan ekonomi. Setiap kejadian gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies harus segera mendapatkan penanganan. Pertolongan pertama bagi korban gigitan meliputi pembersihan luka dengan air mengalir dan sabun atau detergen selama 10-15 menit, lalu diobati dengan antiseptik (seperti alkohol 70%, betadine, atau obat merah), lalu segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kasus gigitan yang dilaporkan ke fasilitas kesehatan akan disediakan perawatan sesuai prosedur, termasuk pemberian vaksin. Luka gigitan tidak boleh dijahit kecuali dalam situasi darurat. Jika memang diperlukan jahitan, maka pemberian Serum Anti Rabies (SAR) sesuai dosis yang tepat akan dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data penelitian, bisa diambil kesimpulan bahwa anjing merupakan populasi yang berisiko terkait dengan penyebaran rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Program pengendalian dan pemberantasan rabies dilaksanakan melalui vaksinasi melalui VAR, eliminasi, pemisahan hewan yang dipelihara, serta pemantauan lalu lintas laut. Target vaksinasi dan eliminasi mencakup semua hewan yang rawan terhadap rabies, terutama anjing, yang ada di daerah yang terdampak penularan. Vaksinasi dilakukan pada seluruh anjing peliharaan di wilayah yang terkena wabah, dengan jarak 10 km dari posisi awal peristiwa gigitan. Eliminasi dilaksanakan pada seluruh anjing liar atau anjing yang dibiarkan berkeliaran, dengan tindakan eliminasi total.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Kepala Loka Litbang P2B2 Timor Tengah Selatan yang sudah bersedia mengarahkan dan saran yang sangat berguna hingga penelitian ini bisa diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan, serta Kepala Puskesmas Kabupaten TTS yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah kecamatan, kelurahan, dan

puskesmas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua staf yang berperan dalam penelitian ini, petugas puskesmas, serta seluruh pihak yang sudah membantu dalam pengumpulan data dan informasi selama penelitian berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). 'Document analysis as a qualitative research method'. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Davies, M., et al. (2017). 'Challenges in rabies control: Case study from Indonesia'. *Journal of Emerging Infectious Diseases*, 23(8), 1323-1327.
- Depertemen Pertanian Direktorat Jendral Bina Produksi Peternakan, Direktorat Kesehatan Hewan. (2003). *Kiat Vetindo rabies: Kesiagaan penanggulangan wabah rabies*. Jakarta.
- Direktorat Jendral PPM & PL Depertemen Kesehatan. (2003). *Pemberian vaksin anti rabies terhadap kasus gigitan hewan penular rabies secara intra dermal dan intra muscular*. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. (2000). *Laporan perkembangan kasus rabies*. Sikka 2008.
- Depertemen Kesehatan Direktorat Jenderal PPM & PL. (2010). *Rabies: Petunjuk perencanaan dan penatalaksanaan kasus gigitan hewan tersangka/rabies di Indonesia*. Jakarta: Depertemen Kesehatan.
- Emerson, K., et al. (2012). 'Collaborative governance of public health issues: The case of rabies in Indonesia'. *Journal of Public Administration*, 15(3), 45-62.
- Fowler, F. J., et al. (2013). *Survey research methods*. SAGE Publications.
- Fooks, A. R., et al. (2017). 'Rabies in humans and the role of post-exposure prophylaxis'. *Veterinary Record*, 180(6), 155-162.
- Frank, J. (1987). *Veteriner Veirology*. Semarang: Ikip Semarang.
- Jackson, A. C. (2013). *Rabies: A worldwide problem of public health*. In *Rabies and rabies virus*.
- Levin, P. H. (2012). *Epidemiology for public health practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Mugenda, O. M., & Mugenda, A. G. (2003). *Research methods: Quantitative and qualitative approaches*. African Centre for Technology Studies Press.
- Rupprecht, C. E., et al. (2010). *Rabies: The facts*. Oxford University Press.
- Soeharsono. (2002). *Zoonosis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods*. SAGE Publications.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Rabies: Fact sheet*. World Health Organization.